

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tentu saja pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar. Penghapusan barang milik daerah merupakan proses tindak lanjut dari siklus pengelolaan barang milik daerah dengan maksud dan tujuan untuk membebaskan pengurus barang milik daerah dari pertanggungjawaban administratif dan fisik barang yang ada dalam pengelolaan Bendahara Barang/Pengurus Barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, penghapusan adalah proses terakhir perjalanan hidup barang milik daerah.

Barang milik daerah yang dimiliki pemerintah daerah, tidak dapat dilepaskan dengan adanya biaya operasional yang terkait dengan BMD tersebut, misalnya saja biaya pemeliharaan. Tentu saja adalah sesuatu yang tidak wajar kalau biaya pemeliharaan barang lebih besar dari manfaat yang diperoleh dari barang tersebut. Apabila hal ini terjadi, akan lebih baik apabila barang tersebut dihentikan saja penggunaannya, dan selanjutnya dilakukan penghapusan. Sehingga pemerintah daerah tidak perlu menanggung biaya yang besar untuk memperoleh manfaat yang kecil apalagi kalau sama sekali tidak dapat dimanfaatkan.

Selain pertimbangan biaya pemeliharaan, barang-barang yang telah rusak atau usang juga membutuhkan tempat penyimpanan, seperti gudang. Semakin banyak barang yang rusak semakin besar ruangan yang dibutuhkan untuk

menyimpan barang-barang tersebut.

Itu kalau kita lihat dari sisi pengelolaan barang dan dampaknya secara fisik. Bagaimana kalau kita melihatnya dari sisi administrasi ? Permendagri 17 tahun 2007 mengamanatkan pengguna barang untuk melakukan penatausahaan atas barang milik daerah. Penatausahaan ini meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pembukuan dilakukan secara komputerisasi dengan menghasilkan daftar barang-daftar barang. Inventarisasi dilakukan dalam periode tertentu untuk memastikan jumlah barang yang ada sesuai dengan pembukuan. Apabila barang yang dimiliki suatu SKPD terdiri dari banyak barang yang rusak, tidak digunakan dan kadaluwarsa, tentu saja akan membebani pembukuan. Sedangkan kalau kita melihat dari sisi pelaksanaan inventarisasi, akan banyak sekali tenaga, waktu dan biaya yang digunakan akan menjadi sesuatu yang sia-sia karena hal itu dilakukan untuk menghitung dan mengidentifikasi barang-barang yang ternyata rusak, tidak terpakai atau kadaluwarsa. Dari sisi laporan, adanya barang-barang semacam ini hanya akan menambah tebal laporan padahal seharusnya laporan memuat barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penghapusan barang milik daerah merupakan suatu hal yang penting serta mekanisme pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

Mengingat pentingnya penghapusan barang milik daerah penulis akan mencoba mengkaji lebih dalam evaluasi dari mekanisme yang digunakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan penghapusan barang milik daerah. Oleh karena itu penulis akan mengangkat judul **“Evaluasi Mekanisme Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Kartu Inventaris Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Pembahasan utama yang akan penulisan sampaikan mengenai Mekanisme Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi :

- a. Pengertian barang milik daerah
- b. Pengertian aset menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan hubungannya dengan barang milik daerah
- c. Penggolongan Barang Milik Daerah
- d. Pengertian pengelolaan barang milik daerah
- e. Landasan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- f. Pengertian Penghapusan Barang Milik Daerah
- g. Pengertian Kartu Inventaris Barang (KIB)
- h. Mekanisme penghapusan barang milik daerah dari kartu inventaris barang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kebumen
- i. Pencatatan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Pembukuan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
- j. Evaluasi mekanisme penghapusan barang milik daerah dari kartu inventaris barang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa mekanisme dari salah satu tindak lanjut pengelolaan barang milik daerah yaitu penghapusan barang milik daerah dari kartu inventaris barang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen,
2. Untuk mengetahui apakah mekanisme penghapusan barang milik daerah dari kartu inventaris barang pada Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan landasan hukum atau peraturan yang berlaku,

3. Untuk lebih memahami pentingnya pengelolaan barang milik daerah khususnya penghapusan barang milik daerah pada suatu Pemerintahan Daerah.

### **1.3.1 Kegunaan Penulisan**

Adapun kegunaan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
  - a. Penulis dapat mengetahui mekanisme yang diterapkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan penghapusan barang milik daerah dari kartu inventaris barang,
  - b. Menambah pengetahuan penulis tentang pengelolaan barang milik daerah khususnya penghapusan barang milik daerah,
  - c. Mengetahui relevansi antara teori yang telah didapatkan selama perkuliahan dengan praktik dan implementasinya di lapangan.
2. Bagi Instansi
  - a. Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan mekanisme penghapusan barang milik daerah dari kartu inventaris yang telah diterapkan,
  - b. Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
3. Bagi masyarakat dan pihak lain

Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diangkat pada Tugas Akhir ini.

#### 1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini , penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu :

##### 1. Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,1998:111).

Dalam metode ini penulis akan mengumpulkan, membaca, dan mempelajari berbagai literature, diantaranya berupa, peraturan pemerintah, undang-undang, dan jurnal yang relevan untuk mendapatkan landasan teoritis mengenai permasalahan yang akan penulis bahas dalam Tugas Akhir ini.

##### 2. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan fakta atau data (*fact finding technique*) yang cukup efektif untuk mempelajari suatu system. Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan (Jogiyanto,2005:623).

Dalam metode ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung kegiatan penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

##### 3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,2009:186).

Dalam metode ini penulis akan mengumpulkan data dengan cara mewawancarai tim penghapusan dan pegawai yang bertanggung jawab

langsung secara teknis dalam melakukan penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dan penyusunan Tugas Akhir ini maka diperlukan penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan yang digunakan penulis untuk menyusun Tugas Akhir ini.

#### **BAB 2 GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang terdiri dari sejarah singkat, visi dan misi, wilayah kerja, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi kedudukan, struktur organisasi, serta uraian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

#### **BAB 3 PEMBAHASAN TEORI DAN PRAKTIK**

Dalam bab ini akan diuraikan mekanisme penghapusan barang milik daerah yang diterapkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dan mnevaluasinya berdasarkan dengan landasan hukum serta peraturan yang berlaku, beserta dengan teori-teori pendukungnya

#### **BAB 4 PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan simpulan dan saran dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab III mengenai Evaluasi Mekanisme Penghapusan Barang Milik Daerah dari Kartu Inventaris Barang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.